

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
HALAMAN PERSETUJUAN PROMOTOR DAN CO PROMOTOR	vi
HALAMAN DEWAN PENGUJI	vii
RINGKASAN DISERTASI	viii
HALAMAN MOTTO	xl
HALAMAN PERSEMBAHAN	xli
KATA PENGANTAR	xlii
DAFTAR ISI	xlii
DAFTAR TABEL	xlvi
DAFTAR GAMBAR	xlvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Manfaat Penelitian	22
E. Kerangka Konseptual	23
F. Kerangka Teori	44
1. <i>Grand Theory</i> /Teori Utama	45
a. Teori Keadilan Bermartabat	45
b. Teori Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>)	55
2. <i>Middle Theory</i> /Teori Menengah	62
a. Teori Berkerjanya Hukum	62
b. Teori Sistem	67
3. <i>Applied Theory</i> /Teori Terapan	76
a. Terori Progresif	76
b. Teori Perlindungan Hukum	85

	Halaman
G. Kerangka Pemikiran.....	96
H. Metode Penelitian Disertasi.....	104
1. Paradigma Penelitian.....	105
2. Metode Pendekatan.....	110
3. Spesifikasi Penelitian.....	111
4. Lokasi Penelitian.....	113
5. Jenis dan Sumber Data.....	113
6. Teknik Pengumpulan Data.....	116
7. Teknik Analisis Data.....	117
8. Validasi Data.....	119
I. Sistematika Penulisan.....	120
J. Orisinilitas/Keaslian Penelitian.....	121
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	127
A. Korban Kejahatan.....	127
1. Pengertian Korban Kejahatan.....	127
2. Hak-hak Korban Kejahatan.....	136
B. Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Seksual.....	139
1. Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Korban Kejahatan.....	139
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Korban Kejahatan.....	144
3. Perlindungan Anak dalam Peraturan Perundang-undangan.....	156
C. Konsep Eksistensi Kompensasi dan Restitusi.....	172
1. Restitusi.....	179
2. Kompensasi.....	193
3. Kompensasi dan Restitusi dalam Peraturan Perundang-undangan.....	201
BAB III. PRINSIP PENGATURAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI BELUM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL.....	208
A. Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual Anak.....	208
B. Pengaturan Kompensasi dan Restitusi Dalam Perundang-undangan.....	247

	Halaman
1. Pengaturan Hukum Kompensasi dan Restitusi Dalam KUHP.....	247
2. Pengaturan Hukum Kompensasi dan Restitusi Di Luar KUHP.....	249
C . Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana.....	262
1. Pemberian Kompensasi.....	273
2. Pemberian Restitusi.....	282
BAB IV. PROBLEMATIKA HUKUM PENGATURAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI BELUM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL.....	308
A. Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual.....	308
B. Problematika Hukum Pengaturan Kompensasi dan Restitusi Dalam Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual.....	331
1. Kompensasi dan Restitusi dalam Perspektif Teoritis ...	331
2. Problematika Hukum Pengaturan Kompensasi dan Restitusi Dalam Peraturan Perundang-undangan.....	335
BAB V. KONSTRUKSI PENGATURAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN.....	373
A. Studi Kompensasi dan Restitusi di Berbagai Negara.....	373
1. Kebijakan Perlindungan Hukum Saksi dan Korban	373
2. Perbandingan Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual di Negara Lain.....	379
3. Perbandingan UUPSK dengan Undang-Undang Sejenis di Negara Lain.....	390
B. Konstruksi Nilai	410
C. Konstruksi Norma Hukum Pengaturan Kompensasi dan Restitusi Dalam Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual berbasis nilai keadilan.....	422
BAB VI. PENUTUP.....	478
A. Simpulan.....	478
B. Saran-saran.....	483
C. Implikasi Kajian.....	485

	Halaman
1. Implikasi Teoritik	485
2. Implikasi Praktis	487
DAFTAR PUSTAKA	489
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1. Bahan Perbandingan Hasil Penelitian	124
3.1. Perbandingan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (Hak-hak yang Diberikan dan Dilindungi).....	228
3.2. Peraturan Nasional tentang Korban	263
3.3. Peraturan-Peraturan terkait Restitusi.....	284
4.1. Putusan Pengadilan Negeri Jawa Barat tentang Kejahatan Seksual	335
5.1. Undang-Undang dan Lembaga Pengaturan Pemberian Kompensasi di Beberapa Negara.....	400
5.2. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Pemberian Kompensasi dengan Negara Belanda, New Zealand dan Amerika Serikat.....	409
5.3. Konstruksi Norma Hukum Pengaturan Kompensasi dan Restitusi Dalam Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Berbasis Nilai Keadilan.....	469
5.4. Konstruksi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	469
5.5. Konstruksi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	470
5.6. Konstruksi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	472
5.7. Konstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.....	472

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1. Kerangka Konseptual Pengaturan Kompensasi dan Restritusi...	44
1.2. Kerangka Teori Disertasi.....	95
1.3. Skema Kerangka Pemikiran.....	104
3.1. Skema Permohonan Pemberian Kompensasi dan Restitusi.....	298